



**SALINAN**

WALIKOTA JAMBI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Kota Jambi;
  - b. bahwa untuk membangun koperasi yang professional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan prinsip koperasi perlu dilakukan pemberdayaan dan pengembangannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Tatacara Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
14. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.kukm/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi;
15. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.kukm/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi;
16. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
17. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.kukm/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi; (Penambahan);

18. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Jambi.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
5. Dinas adalah OPD yang secara teknis menangani pemberdayaan dan pengembangan Koperasi Kota Jambi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala OPD yang secara teknis menangani pemberdayaan dan pengembangan Koperasi Kota Jambi.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

8. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
9. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi.
10. Koperasi Produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
11. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota.
12. Koperasi Jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.
13. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
14. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perlengkapan organisasi koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari-hari.
15. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah kelengkapan organisasi koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi.
16. Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah pengelola kegiatan usaha koperasi yang diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus.
17. Anggota koperasi selanjutnya disebut anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
18. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas.
19. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang diangkat oleh Walikota sesuai kewenangannya atas usul Kepala SKPD.
20. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
21. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.

22. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah/atau Lembaga Non Pemerintah untuk memberdayakan koperasi melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan daya saing koperasi;
23. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan yang memuat : daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan keanggotaan, ketentuan rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdiri, ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha, ketentuan mengenai sanksi.
24. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar.
25. Standar Operasional Manajemen yang selanjutnya disingkat SOM adalah pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan koperasi dibidang organisasi, kelembagaan, usaha dan pengelolaan keuangan.
26. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dari Standar Operasional Manajemen yang berisikan peraturan dan kebijakan serta tata kerja dan/atau sistem prosedur kerja koperasi.
27. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
28. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
29. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri kegiatan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
30. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.
31. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha.
32. Penguatan adalah fasilitasi kepada Koperasi berupa modal, penjaminan kredit, sarana dan sumberdaya manusia.
33. Lembaga Penjamin Kredit Daerah adalah lembaga yang bergerak dalam pemberian jasa penjaminan kredit dan dukungan permodalan perkoperasian baik yang dikelola Pemerintah maupun swasta yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

34. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah SKPD dan Pengawasan Penyidik Polri.

#### Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 3

Koperasi berdasarkan asas kekeluargaan.

#### Pasal 4

Tujuan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi meliputi :

- a. menumbuhkan koperasi sebagai bangun ekonomi kerakyatan;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan profesionalisme pengelolaan koperasi;
- c. mewujudkan koperasi yang berkualitas tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan berakar dalam masyarakat;
- d. Memberikan perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi; dan
- e. memperkuat kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekonomian Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II

### PRINSIP DAN PENGELOLAAN KOPERASI

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yang terdiri dari :
  - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;

- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
  - e. kemandirian.
- (2) Dalam pengembangannya koperasi juga melaksanakan prinsip sebagai berikut :
- a. pendidikan perkoperasian;
  - b. kerjasama antar koperasi; dan
  - c. inovasi usaha koperasi.

### Pasal 6

- (1) Pengelolaan Koperasi menjunjung tinggi nilai organisasi dan nilai etika.
- (2) Nilai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. menolong diri sendiri;
  - b. tanggung jawab sendiri;
  - c. persamaan; dan
  - d. keadilan.
- (3) Nilai etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kejujuran;
  - b. tanggung jawab sosial; dan
  - c. kepedulian terhadap orang lain.

## BAB III

### KELEMBAGAAN KOPERASI

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Koperasi

### Pasal 7

- (1) Koperasi di Daerah berbentuk :
- a. koperasi primer; dan
  - b. koperasi sekunder.
- (2) Koperasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Badan Usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Badan Hukum Koperasi yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua  
Pembentukan Koperasi

Pasal 8

- (1) Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi berkewajiban memahami:
  - a. pengertian, nilai dan prinsip koperasi;
  - b. azas kekeluargaan;
  - c. prinsip badan hukum; dan
  - d. prinsip modal sendiri atau ekuitas.
- (2) Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
  - b. Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi;
  - c. Pendiri Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama;
  - d. Pendiri Koperasi Sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi Sekunder;
  - e. Nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;
  - f. Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
  - g. Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar; dan
  - h. Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian koperasi.

Pasal 9

- (1) Para pendiri mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan :
  - a. rencana pembentukan koperasi
  - b. nama koperasi;
  - c. rancangan anggaran dasar koperasi;
  - d. usaha koperasi;
  - e. besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;

- f. pemilihan pengurus; dan
  - g. pemilihan pengawas.
- (2) Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan perkoperasian oleh Dinas.
  - (3) Apabila didalam pembentukan koperasi berdasarkan penilaian Dinas bahwa kelompok yang bermaksud untuk membentuk koperasi belum layak untuk diusulkan memperoleh status badan hukum, maka kelompok dimaksud diberikan tenggang waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan untuk melakukan aktifitasnya dan memenuhi standar kelayakan koperasi.
  - (4) Dalam rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihadiri oleh Notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  - (5) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian.

#### Pasal 10

- (1) Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi yang diwakili pengurus yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi.
- (2) Rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pendiri.
- (3) Rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan anggaran dasar koperasi.
- (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. daftar nama pendiri;
  - b. nama dan tempat kedudukan;
  - c. jenis koperasi;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. jangka waktu berdirinya;
  - f. keanggotaan;
  - g. jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
  - h. permodalan;
  - i. rapat anggota;
  - j. pengurus;
  - k. pengawas;
  - l. pengelolaan dan pengendalian;
  - m. bidang usaha;

- n. pembagian sisa hasil usaha;
  - o. ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan
  - p. sanksi.
- (5) Hasil pelaksanaan Rapat Anggota pembentukan koperasi dibuat dalam :
- a. berita acara rapat pendirian koperasi; atau
  - b. notulen rapat pendirian Koperasi.

#### Pasal 11

- (1) Pendirian Koperasi dituangkan dalam Akta Pendirian Koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dicatat oleh Notaris yang telah mendapat penetapan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.
- (3) Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pengesahan

#### Pasal 12

- (1) Para pendiri koperasi atau kuasanya mempersiapkan akta pendirian koperasi untuk diajukan kepada Notaris.
- (2) Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi dengan ahli perkoperasian yang didampingi oleh Notaris.
- (3) Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada Menteri melalui Notaris Atas rekomendasi Kepala Dinas.

#### Pasal 13

- (1) Permohonan pengesahan Akta pendirian koperasi diajukan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari Pejabat Pembuat Akta Koperasi;
  - b. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup;
  - c. surat kuasa pendiri;
  - d. notulen rapat pembentukan koperasi;
  - e. berita acara rapat Pembentukan Koperasi;
  - f. akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;

- g. surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
  - h. surat keterangan domisili;
  - i. rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi; dan
  - j. surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam, bagi Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam.
- (2) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sekunder dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditambah dengan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder, foto copy keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi pendiri, serta surat kuasa dari koperasi.

#### Pasal 14

- (1) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri.
- (2) Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum koperasi.
- (3) Dokumen Pengesahan Badan Hukum dan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j, dibuat secara terpisah menjadi:
  - a. dokumen pengesahan akta pendirian koperasi sebagai Badan Hukum; dan
  - b. dokumen pengesahan izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam.

#### Pasal 15

- (1) Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi dihimpun oleh Dinas dan dicatat dalam Buku Daftar Umum Koperasi.
- (2) Keputusan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung oleh Menteri kepada pendiri melalui Notaris.
- (3) Notaris menyampaikan tembusan pengesahan bahan hukum koperasi kepada walikota melalui Dinas.

#### Bagian Keempat

#### Keanggotaan

#### Pasal 16

- (1) Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.

- (2) Setiap anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
- (3) Persyaratan untuk menjadi anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (4) Orang seorang atau Badan Hukum Koperasi yang telah menerima pelayanan dari koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota koperasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dinyatakan sebagai calon anggota koperasi.
- (5) Orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dinyatakan sebagai anggota koperasi apabila:
  - a. melunasi simpanan pokok;
  - b. tercatat dalam buku daftar anggota;
  - c. menandatangani dan membubuhkan sidik ibu jari sebelah kiri pada buku daftar anggota; dan
  - d. daftar anggota dapat dibuat dalam bentuk elektronik, dengan tetap melengkapi dokumen permohonan menjadi anggota yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol.

#### Pasal 17

Setiap anggota koperasi berhak:

- a. menyatakan pendapat;
- b. memberikan suara;
- c. memilih dan/atau dipilih dalam rapat anggota;
- d. meminta diadakan rapat;
- e. mendapat pelayanan;
- f. meminta laporan perkembangan koperasi;
- g. mendapatkan pendidikan perkoperasian; dan
- h. melakukan pengawasan.

#### Pasal 18

Setiap anggota berkewajiban:

- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
- b. mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- c. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- d. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan; dan
- e. membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Bagian Kelima  
Perangkat Organisasi Koperasi

Pasal 19

- (1) Perangkat organisasi koperasi terdiri atas:
  - a. rapat anggota;
  - b. pengurus; dan
  - c. pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus dapat mengangkat pengelola.

Paragraf 1

Rapat Anggota

Pasal 20

- (1) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang menetapkan garis kebijakan koperasi, kepengurusan koperasi, dan pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam menjalankan usahanya.
- (2) Rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, dikenal dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- (3) Rapat anggota tahunan membahas laporan pertanggungjawaban tutup buku, setelah dilakukan pengawasan oleh pengawas dan/atau akuntan publik.
- (4) Rapat Anggota Tahunan diadakan 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tutup buku.
- (5) Koperasi yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat mengundang/mengikutsertakan Dinas sebagai aparat pembina.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 21

Apabila jumlah anggota koperasi menyebabkan penyelenggaraan rapat anggota berjalan tidak efektif, penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui sistem perwakilan atau penggunaan teknologi informasi.

Paragraf 2

Pengurus

Pasal 22

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Tugas dan wewenang Pengurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi.
- (6) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian.
- (7) Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (8) Seorang pengurus koperasi dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada koperasi lainnya.
- (9) Pengurus tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola;
- (10) Pengurus dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa kepengurusannya apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan koperasi; dan
  - d. mengundurkan diri.
- (9) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.
- (10) Perubahan kepengurusan koperasi dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemilihan dan pengangkatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Paragraf 3

Pengawas

Pasal 23

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.

- (2) Pengawas bersifat kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Tugas dan wewenang Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian.
- (5) Masa jabatan pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (6) Seorang pengawas koperasi dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada koperasi lainnya.
- (7) Pengawas tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola.
- (8) Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan koperasi; dan
  - d. mengundurkan diri.
- (9) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemilihan dan pengangkatan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.

Paragraf 4  
Pengelola

Pasal 24

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus.
- (2) Pengangkatan Pengelola koperasi dengan mengajukan rencana pengangkatan pada rapat anggota.
- (3) Pengangkatan Pengelola dalam kontrak kerja pengelolaan koperasi mendasarkan pada pertimbangan profesionalitas dan kompetensi.
- (4) Tugas dan fungsi Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Pengurus, meliputi penjabaran pendelegasian tugas dan kewenangan Pengurus yang bersifat operasional.
- (5) Pengelola bertanggungjawab kepada pengurus.
- (6) Pengelola dapat perseorangan atau Lembaga Pengelola yang dilengkapi dengan perangkat manajerial sesuai dengan beban kerja dan rentang kendali.
- (7) Pengelola memiliki keahlian, ketrampilan, akhlak dan moral yang baik untuk memajukan usaha koperasi.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan pengelola diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

BAB IV  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
KOPERASI

Pasal 25

- (1) Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi.
- (2) Perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi sedang dinyatakan pailit.
- (3) Materi perubahan anggaran dasar koperasi dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.
- (4) Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari Menteri.
- (5) Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada Walikota.
- (6) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengurus melalui Notaris dengan rekomendasi Dinas.
- (7) Prosedur dan Persyaratan pengesahan perubahan anggaran dasar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

Bagian Kedua  
Pemberdayaan dan Pengembangan

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan Pengembangan terhadap koperasi, antara lain melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran; dan
- c. pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha.

Paragraf 1

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 28

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, bagi perangkat organisasi dan anggota koperasi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Paragraf 2

Fasilitasi Sarana Akses Sumberdaya Ekonomi dan Pemasaran.

Pasal 29

- (1) Fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain melalui:
  - a. akses permodalan dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah;
  - b. akses sarana promosi dan pemasaran; dan
  - c. akses bahan baku dan sarana produksi.
- (2) Selain Fasilitasi sarana akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Jambi, atau Lembaga Keuangan lainnya.
- (3) khusus perjanjian kerjasama dengan Bank Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan suku bunga pinjaman setinggi-tingginya sebesar 6% (enam) persen/tahun.

#### Pasal 30

- (1) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan Badan Layanan Umum Daerah dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemasaran hasil produksi koperasi melalui promosi, pameran, dan kontak dagang.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi akses ketersediaan bahan baku dan sarana produksi.

#### Paragraf 3

Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan, Manajemen dan Usaha

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, untuk menjamin kelangsungan koperasi.
- (2) Pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Dinas, dan dapat dibantu oleh Tenaga Penyuluh Koperasi.

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pengembangan usaha koperasi agar memiliki daya saing yang kuat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan syarat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Ketiga

#### Lembaga Gerakan Koperasi

#### Pasal 34

- (1) Koperasi secara bersama-sama dapat mendirikan Lembaga Gerakan Koperasi berdasarkan kesamaan kepentingan.
- (2) Pendirian Lembaga Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 35

Lembaga Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat melakukan kegiatan :

- a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi;
- b. meningkatkan kesadaran perkoperasian di kalangan masyarakat;
- c. melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain; dan
- e. menanamkan dan menjaga kode etik berkoperasi.

## BAB VI

### USAHA KOPERASI

#### Bagian Kesatu

#### Lapangan Usaha Koperasi

### Pasal 36

- (1) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan Anggota dan masyarakat dibidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta bidang usaha lainnya.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunggal usaha atau serba usaha.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan:
  - a. konvensional; atau
  - b. berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
- (4) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

- (1) Kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dalam menjalankan usahanya wajib memiliki izin sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus Perizinan Usaha Simpan Pinjam ditangani oleh Dinas.

Bagian Kedua  
Usaha Simpan Pinjam

Pasal 38

- (1) Usaha simpan pinjam baik pola konvensional maupun pola syariah dapat menjalankan usaha setelah mendapat izin dari Walikota.
- (2) Permohonan izin usaha simpan pinjam pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Koperasi kepada Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan izin usaha simpan pinjam pola konvensional maupun pola syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan yang berupa Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota koperasi.
- (2) Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan dengan syarat:
  - a. telah melaksanakan usaha simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - b. mempunyai predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat; dan
  - c. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya.
- (3) Pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan pinjam pada Kabupaten/Kota dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Walikota dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota domisili kantor cabang.
- (4) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk di wilayah keanggotaan Koperasi Simpan pinjam sesuai dengan Anggaran Dasarnya.
- (5) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang.
- (6) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat beroperasi setelah mendapat ijin tempat usaha dari Bupati/Walikota setempat dan dilaporkan kepada Walikota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan ijin pembukaan jaringan pelayanan Koperasi Simpan pinjam sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (8) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang berkedudukan di wilayahnya.

- (9) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat bukti bahwa kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas tidak memenuhi peraturan dalam usaha simpan pinjam oleh koperasi, Walikota berwenang menutup kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.

#### Pasal 40

- (1) Khusus koperasi simpan pinjam kegiatan usaha yang diselenggarakan hanya untuk melayani anggota.
- (2) Koperasi simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat suku bunga pinjaman paling besar 3 (tiga) perseratus / bulan
- (3) Koperasi simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mencapai volume usahanya dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik.
- (4) Bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), wajib dilakukan penilaian atas kesehatan koperasi, yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Bagian Ketiga

#### Tahapan Usaha Koperasi

#### Pasal 41

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi terdiri dari:
  - a. tahap perencanaan;
  - b. tahap pelaksanaan; dan
  - c. tahap pertanggungjawaban.
- (2) Tahap kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut tahun buku takwim.
- (3) Perencanaan ditetapkan dalam rapat anggota pada sebelum atau pada awal tahun buku berjalan bersamaan dengan rapat anggota tahunan.
- (4) Perencanaan memuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi yang disusun secara demokratis, realistis dan prospektif.
- (5) Apabila dalam masa pelaksanaan perencanaan terdapat perubahan lingkungan strategis yang membuat asumsi perencanaan tidak berlaku, perencanaan dapat dilakukan perubahan oleh rapat Pengurus yang selanjutnya dimintakan persetujuan dalam rapat anggota.
- (6) Dokumen perencanaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota melalui Dinas.

#### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan usaha koperasi mendasarkan pada perencanaan dan menjadi tanggungjawab Pengelola dibawah pembinaan dan pengawasan Pengurus dan/atau Pengawas.
- (2) Dalam masa pelaksanaan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi berkala atas kinerja pelaksanaan koperasi
- (3) Evaluasi yang dilakukan setiap bulan bersifat internal koperasi .
- (5) Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan bersifat internal koperasi dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui dinas.
- (6) Evaluasi Tahunan dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban tahun buku dan dilakukan dihadapan rapat anggota serta hasilnya dilaporkan kepada Walikota.
- (7) Koperasi melakukan pembukuan yang mendasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Ruang Lingkup Pengawasan.

#### Pasal 43

Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi :

- a. pembinaan pelaksanaan pengendalian internal koperasi;
- b. pemantauan perkembangan koperasi secara berkala;
- c. pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar operasional manajemen dan Standar operasional prosedur koperasi; dan
- d. pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan pinjam/ Unit Simpan Pinjam.

#### Pasal 44

Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi rapat anggota koperasi;
- b. meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengurus dan pengelola koperasi;
- c. meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengawas;
- d. meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal;

- e. mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota;
- f. mendorong terjadinya efisiensi biaya organisasi koperasi; dan
- g. mendorong dipatuhinya seluruh pedoman dan aturan usaha koperasi.

#### Pasal 45

Pemantauan perkembangan koperasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilaksanakan dengan cara :

- a. mengevaluasi rencana dan capaian kinerja koperasi;
- b. memberikan petunjuk teknis dan pelaporan koperasi; dan
- c. memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan koperasi.

#### Pasal 46

Pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan pemeriksaan efektifitas organisasi koperasi;
- b. melakukan pemeriksaan pengelolaan usaha koperasi;
- c. melakukan pemeriksaan kinerja keuangan; dan
- d. memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.

#### Pasal 47

- (1) Pemingkatan koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan pinjam/ Unit Simpan Pinjam. Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk tim pembina koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemingkatan koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan pinjam/ Unit Simpan Pinjam. Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Pengawasan

#### Pasal 48

- (1) Pengawasan koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas.
- (2) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima dan meminta laporan kondisi organisasi usaha dan permodalan koperasi;

- b. melakukan pemeriksaan atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai koperasi;
  - c. merekomendasikan kepada Walikota untuk mengenakan sanksi, apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa koperasi menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan asas-asas koperasi dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mengeluarkan perintah untuk menempatkan koperasi dalam pengawasan administratif.
- (3) Pejabat pengawas melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Walikota.
  - (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan hasil pengawasan oleh koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

#### Bagian Ketiga

#### Pembubaran Koperasi

#### Pasal 50

- (1) Koperasi dapat dibubarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau membubarkan diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usulan Walikota melalui Dinas.

#### Pasal 51

- (1) Pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dalam hal :
  - a. koperasi yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi;

- b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 52

- (1) Koperasi yang membubarkan diri dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. koperasi harus melaksanakan Rapat Anggota dengan agenda pembubaran koperasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
  - b. rapat anggota sebagaimana dimaksud huruf a memutuskan pembubaran koperasi sekaligus menunjuk dan memberi kuasa kepada tim penyelesaian yang terdiri dari perwakilan anggota dan pengurus;
  - c. tim penyelesaian menyelesaikan hak dan kewajiban anggota dan pihak terkait, sebagai akibat dibubarkannya koperasi yang dituangkan dalam berita acara;
  - d. pengurus koperasi menyampaikan surat permohonan persetujuan pembubaran koperasi disertai berita acara sebagaimana dimaksud huruf c melalui Kepala Dinas untuk dilakukan kajian dan diteruskan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan; dan
  - e. batas waktu penyelesaian pembubaran koperasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan rapat anggota pembubaran koperasi.
- (2) Kepala Dinas atas nama Walikota mengusulkan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk diterbitkan surat keputusan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

#### BAB VIII

#### KEWAJIBAN

#### Pasal 53

Setiap Koperasi wajib :

- a. memiliki domisili hukum yang tetap;
- b. memiliki izin usaha selambat - lambatnya 2 (dua) tahun sejak disahkannya badan hukum koperasi;
- c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;

- d. Melaksanakan rapat anggota paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- e. Memasang papan/plang nama koperasi;
- f. mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota;
- g. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyampaikan laporan tertulis baik organisasi maupun usaha secara periodik ke Walikota melalui Dinas.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 54

- (1) Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. pencabutan izin usaha koperasi; atau
  - e. pembubaran koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. koperasi yang telah memiliki status Badan Hukum dinyatakan tetap berlaku; dan
- b. izin usaha koperasi yang dimiliki tetap masih berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 7 Maret 2018

Pjs. WALIKOTA JAMBI,

ttd

MUHAMMAD FAUZI

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 7 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SETDA KOTA JAMBI

ttd

ttd

BUDIDAYA

EDRIANSYAH, SH., MM  
NIP.19720614 199803 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : ( 1 / 2018 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

I. UMUM

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Kota Jambi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya perlu dijelaskan lagi agar dalam operasionalnya lebih difahami secara utuh dan dapat dilaksanakan dengan benar. Terkait dengan hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa koperasi merupakan urusan wajib bagi pemerintah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu menjabarkan secara tegas dan rinci sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah Jambi dengan harapan dapat memberikan perlindungan, kemudahan dan fasilitasi baik kepada masyarakat, anggota dan/atau calon anggota koperasi maupun kepada koperasi selaku badan usaha.

Mendasarkan hal-hal tersebut di atas, guna membangun koperasi yang profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan prinsip koperasi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi.

II. PASAL DEMI ASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud balas jasa yang terbatas terhadap modal adalah modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan, yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga berlaku di pasar.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud inovasi usaha koperasi adalah koperasi dapat melakukan berbagai usaha melalui unit-unit usahanya dengan tujuan utama adalah dalam rangka mensejahterakan anggotanya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 21

Yang dimaksud jumlah keanggotaan koperasi tidak memungkinkan penyelenggaraan rapat anggota berjalan secara efektif, penyampaian pendapat anggota dapat dilakukan melalui sistem perwakilan secara proporsional terhadap jumlah anggota yang diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Apabila koperasi telah menggunakan teknologi informasi yang memadai, anggota dapat menyalurkan aspirasi dan hak suaranya secara langsung.

## Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan yang merugikan koperasi” adalah tindakan yang telah dibuktikan berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh pengawas dan/atau pejabat pengawas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan yang merugikan koperasi” adalah tindakan yang telah dibuktikan berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh pengawas dan/atau pejabat pengawas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Koperasi yang dapat diberikan pinjaman adalah berdasarkan penilaian Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “Lembaga Gerakan Koperasi” merupakan suatu organisasi himpunan koperasi yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

#### Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

#### Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “koperasi dalam pengawasan administratif” adalah:

- a. koperasi yang dalam menjalankan kegiatan usaha telah memiliki akta pendirian dan berbadan hukum akan tetapi tidak memiliki izin usaha dan/atau telah habis masa berlakunya;
- b. sedang dalam pengawasan untuk tidak memberikan layanan kepada anggota/calon anggotanya;
- c. khusus untuk KSP dan USP-Koperasi yang mempunyai kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor kas tetapi belum memperoleh izin pembukaan kantor cabang dan/atau izin lokasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah pihak-pihak yang memberikan pinjaman modal dan/atau penyertaan modal koperasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 1